



TAK SEBANDING DENGAN ALOKASI PENANGANAN SAMPAH Usulan Pengadaan Lahan RTHP Rp 12,5 Miliar Jadi Polemik

YOGYA (KR) - Usulan Pemkot Yogya untuk melakukan pengadaan lahan ruang terbuka hijau publik (RTHP) melalui perubahan anggaran tahun ini menjadi polemik. Hal ini muncul lantaran alokasi tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan sampah yang lebih mendesak.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, mengungkapkan APBD perubahan menjadi sarana efektif dalam menggeser kegiatan yang sifatnya mendesak. Apalagi tahun ini ada penambahan sebesar Rp 175 miliar yang harus dibelanjakan hingga akhir tahun. "Usulan kegiatan yang disampaikan tim eksekutif menjadi pencermatan. Kita semua tahu bagaimana masalah sampah di Kota Yogya belum juga tuntas. Masyarakat menaruh harapan sangat besar terkait hal itu. Tetapi nampaknya keberpihakan eksekutif masih kurang," tegasnya, Jumat (12/7).

Dirinya mencontohkan porsi anggaran perubahan untuk mengatasi sampah yang belum optimal. Sejauh ini hanya, pengadaan alat insinerator sebanyak dua unit yang diusulkan dengan total Rp 7,4 miliar. Sementara ada pos lain yang belum mendedsak justru diajukan dengan

alokasi yang cukup besar, yakni pengadaan lahan untuk RTHP di Kelurahan Muja Muju senilai Rp 12,5 miliar.

Menurutnya, dengan rentetan persoalan sampah yang telah terjadi selama satu tahun ini seharusnya masuk kondisi darurat. Oleh karena itu skala penanganannya pun harus menyesuaikan kondisi tersebut. Seperti halnya pada masa pandemi Covid-19, banyak kegiatan yang akhirnya dilakukan refocusing untuk menangani masalah itu. Oleh karena itu, alokasi Rp 12,5 miliar untuk pengadaan RTHP di Muja Muju akan lebih bijak jika dialihkan untuk penanganan sampah secara darurat. "Darurat ini bagaimana supaya setiap depo bersih dari sampah dan masyarakat tidak kesulitan. Kemudian langkah jangka panjang juga disiapkan. Perkaras sampah di depo yang membludak itu mau ditaruh di mana, pasti ada solusi jika ada daya dukung anggaran. Rp 12,5 miliar sangat bisa untuk melakukan itu. Ini darurat dan butuh penanganan segera," tegasnya lagi.

Selama ini target yang dipatok eksekutif terkait sampah belum juga tercapai. Dari semula ditargetkan tuntas akhir Juni, namun hingga pertengahan Juli kondisi

depo masih terjadi penumpukan. Tumpukan sampah liar bahkan kerap ditemukan di beberapa pinggir jalan maupun ruang publik.

Pengadaan RTHP, imbuh Rifki, kebutuhannya belum mendesak seperti halnya penanganan sampah. Apalagi hal itu terkesan dipaksakan lantaran baru diusulkan melalui perubahan anggaran. Seharusnya, ketika sudah ada perencanaan matang terkait peruntukannya, sudah diajukan sejak APBD murni. Apakah akan difungsikan sebagai taman bermain, tempat olahraga, atau bahkan tempat pendidikan atau pertemuan mengingat lokasinya yang cukup luas.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Wahyu Handoyo, mengaku masih melakukan pembahasan dengan mitra kerja di dewan. Selaku pengguna anggaran untuk pengadaan lahan RTHP, pihaknya juga akan menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Menurutnya, luas lahan RTHP di Muja Muju yang hendak dibeli Pemkot mencapai sekitar 2.000 meter persegi. Peruntukannya juga bisa dikapling menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005